

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan bagi masyarakat merupakan salah satu permasalahan yang cukup berat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Salah satu contoh adalah masalah yang terjadi pada sektor ekonomi yaitu kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan masalah yang mengglobal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang (11,22 %) dari jumlah penduduk Indonesia yang sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96%). (Online). <http://bps.go.id/brs/view/1158>. Diakses 15 Sept 2015-Data Sensus.

Penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan nasional. Slamet (2003), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Pembangunan (development) merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun nyatanya tidak menunjukkan hasil yang cukup signifikan, hal ini tentu beralasan kuat,

mengingat masih banyaknya masyarakat yang berstatus Keluarga Pra Sejahtera (belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal) dan Keluarga Sejahtera I (telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya).

Berdasarkan data dari Desa Bakaran Batu, keluarga yang berstatus Pra S sebanyak 19 KK, dan KS I sebanyak 203 KK. Keluarga ini sangat rentan terhadap masalah-masalah ekonomi dan sosial. Sehingga sangat mungkin terjadi penurunan status kesejahteraan setiap saat. Tentunya keadaan ekonomi yang serba kekurangan akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga itu sendiri dan juga masyarakat. Oleh karena itu diperlukan usaha terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memberikan kemampuan kepada keluarga terutama keluarga yang masih dalam tahap Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I agar dapat diberdayakan.

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Pada pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

BKKBN sebagai salah satu instansi pemerintah yang memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Program KB adalah sebagai salah satu

program strategis yang memutus angka kemiskinan dengan beberapa faktor seperti pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan kelestarian lingkungan. Dikatakan bahwa tujuan Pemerintah untuk menyelenggarakan program keluarga berencana adalah agar keluarga kecil yang terbentuk dapat meningkatkan kualitasnya serta hidup layak dan sejahtera. Upaya yang dilakukan secara langsung adalah memberi kesempatan kepada masyarakat, terutama keluarga miskin (Pra S & KS I) untuk meningkatkan tahapan kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Kegiatan pemberdayaan keluarga diantaranya dengan memberikan pembelajaran dalam berbagai bidang usaha atau menjadi tenaga terampil melalui pendekatan kelompok yakni kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik yang sudah ber-KB (akseptor) maupun masyarakat umum dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri masyarakat dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga sehingga kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih baik melalui pembelajaran usaha ekonomi.

Program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera) sangatlah penting keberadaannya oleh karena itu perlu dipertahankan dan

dikembangkan. Usaha ini membina ibu-ibu rumah tangga yang termasuk golongan keluarga Pra S dan KS I agar dapat mendapatkan penghasilan pribadi dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk diolah dan dikelola menjadi suatu usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Karena selain menambah pendapatan bagi keluarganya, penciptaan usaha melalui UPPKS juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu yang suaminya adalah seorang pengangguran.

Namun kenyataannya menunjukkan bahwa banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan program UPPKS di Desa Bakaran Batu. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi dan lemahnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang program UPPKS yang berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa program UPPKS di Bakaran Batu tidak berkembang.

Berdasarkan data dari Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, kegiatan UPPKS ini telah dilaksanakan, sejak tahun 2009. Awalnya kelompok UPPKS ini berjumlah 3 kelompok, namun lambat laun kelompok tersebut tidak aktif lagi, saat ini hanya tinggal 1 kelompok. Adapun kegiatan kelompok yang ada di desa tersebut adalah usaha industri rumah tangga yaitu pembuatan tape ubi/ketan. Kelompok ini pun mengalami kendala dalam mendapatkan bahan baku yang berkualitas dan keterampilan untuk memberi inovasi pada produk maupun pengemasan.

Banyak kendala yang diprediksi menjadi hambatan tidak berkembangnya program UPPKS, seperti yang dihadapi di Desa Bakaran Batu

diantaranya dari aspek Sumber Daya Manusianya (SDM) dan aspek usaha mikro. Dari aspek SDM adalah relatif rendahnya keterampilan dan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada (SDA, permintaan pasar), cenderung rendahnya partisipasi masyarakat Pra S terhadap UPPKS. Sedangkan dari aspek usaha adalah tidak adanya dana yang diberikan pemerintah untuk kelompok UPPKS, sedikitnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar sebagai bahan baku produk, produk yang dihasilkan belum inovatif, dan belum adanya pemanfaatan teknologi untuk produksi maupun pemasaran.

Dari aspek SDM, juga diprediksi terdapat faktor kurang berkembangnya UPPKS tersebut, yakni faktor persepsi (tanggapan) dari masyarakat bahwa dengan keadaan mereka yang masih pra sejahtera mereka tidak bisa mengikuti kegiatan UPPKS mengingat minimnya dana, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Mereka beranggapan anggota kelompok UPPKS adalah keluarga yang sudah memiliki usaha kecil. Ini lah yang menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan program tersebut.

Kendala-kendala yang dialami diatas, telah mengakibatkan program UPPKS di Desa Bakaran Batu tidak berkembang. Ini sejalan dengan keadaan UPPKS di Bakaran Batu yaitu dimana desa ini hanya memiliki satu kelompok dan tidak adanya masyarakat pra sejahtera yang sebagai sasaran utama menjadi anggota dalam kelompok tersebut. Hal ini juga disebabkan karena sulitnya pekerja KB dalam membentuk kelompok UPPKS yang memiliki keterampilan yang sama. Pada akhirnya program UPPKS ini belum benar-benar memberdayakan masyarakat miskin (Pra S dan KS I). Hal ini tentu tidak

boleh dibiarkan perlu dianalisis faktor-faktor penyebab tersebut untuk kemudian dikaji solusi yang tepat dalam meningkatkan keefektifan program UPPKS di tengah-tengah masyarakat.

Upaya menganalisis faktor-faktor penghambat berkembangnya program UPPKS dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan, termasuk diantaranya dengan melakukan penelitian. Hal ini yang mendorong perlunya dilakukan penelitian ini dengan judul **“Tanggapan Masyarakat Terhadap Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Masih adanya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam.
2. Lemahnya pemberian informasi program UPPKS kepada masyarakat di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam
3. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa program UPPKS dilaksanakan bagi masyarakat/keluarga yang memiliki usaha kecil-kecilan (mikro).
4. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar sebagai bahan baku produk.
5. Sulit terbentuknya kelompok UPPKS di Desa Bakaran Batu

1.3. Batasan Masalah

Banyak faktor yang dapat menentukan berkembang tidaknya program UPPKS di masyarakat, namun dalam penelitian ini faktor tersebut dibatasi hanya pada tanggapan masyarakat terhadap program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Penelitian ini dapat dilakukan dimana saja, namun karena gejala tidak berkembangnya program ini di Lubuk Pakam, maka penelitian ini dibatasi hanya di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa baik tanggapan masyarakat terhadap program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam?”.

1.5. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat Pra Sejahtera terhadap program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam.

1.6. Manfaat

Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan masukan untuk memahami tanggapan masyarakat Pra S terhadap manfaat program UPPKS.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait guna penyempurnaan strategi program peningkatan kesejahteraan keluarga.

Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi pengelola kelompok UPPKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pra sejahtera.
2. Sebagai upaya untuk mengetahui manfaat kelompok UPPKS bagi masyarakat.